

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)



Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman
Barat
Tahun 2022



Jl. M. Natsir No. 2 Simpang Empat ☎ / fax (0753) 7464101



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan

Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V PENUTUP

(2) Renja PD Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 6 Agustus 2021



BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 6 Agustus 2021



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat memberikan informasi mengenai evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, rencana kerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun anggaran 2022. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

Rencana kerja ini masih memiliki keterbatasan, sehingga segala kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan penyusunan renja berikutnya. Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 6 Agustus 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKES TAHUN 2020	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	23
2.4 Review Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat	46
BAB III TUJUAN dan SASARAN	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	51
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	71
BAB V PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Renja berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Kesehatan memuat kebijakan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, program dan kegiatan pembangunan kesehatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021 dan 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Pasaman Barat tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021;

14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja;
16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Atas Perubahan Tujuan, Sasaran, Program Pada Rencana Pembangunan Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat untuk menyediakan dokumen perencanaan satu tahun yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja dinas kesehatan.

Secara khusus penyusunan Renja Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan selama satu tahun
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan kesehatan yang ada di setiap bidang (Sekretariat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Sumber Daya Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan).
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 *Landasan Hukum*

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 *Maksud dan Tujuan*

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 *Sistematika Penulisan*

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Dinkes*

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinkes*

Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota

serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang

langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Dinkes*

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 *Program dan Kegiatan*

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir), uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas kesehatan

Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 15 program dengan 34 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 memuat pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun 2019. Selain itu, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dan diperoleh melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas kesehatan tahun 2020 antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan;
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Indikator capaian tahun 2020 sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian pada kelompok rentan, yang terdiri dari ibu, bayi dan balita.

- a. Angka Kematian Ibu ((AKI) target 81/100.000 KH))

Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 adalah 219 per 100.000 kelahiran hidup (18 kasus), mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan angka kematian ibu 75.8 per 100.000 kelahiran hidup (8 kasus). Angka ini masih belum memenuhi target renstra dinas kesehatan untuk tahun 2020.

- b. Angka Kematian Bayi ((AKB)/ target 9/1000 KH)

Angka Kematian Bayi tahun 2020 adalah 3.05 per 1000 kelahiran hidup, menurun jika dibandingkan dengan kematian bayi tahun 2019 yaitu 8.9 per 1000 kelahiran hidup, jika dibandingkan dengan target penurunan AKB pada renstra masih belum tercapai.

- c. Angka Kematian Balita ((AKABA)/ target 9/1000 KH)

Angka Kematian Balita tahun 2020 adalah 4.02 per 1000 kelahiran hidup, menurun dibandingkan tahun 2019 dengan 9.9 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita tahun 2020 ini lebih rendah daripada target renstra.

Capaian program kesehatan ibu dan anak pada tahun 2020, meliputi kunjungan K-4 sebesar 58.60%, persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 70.6%, persalinan yang ditolong bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 72.9%, persalinan di fasilitas kesehatan 72.9%, cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 95.1%, SDIDTK

pada bayi 61.7%, SDIDTK pada balita 70%, komplikasi neonatal yang ditangani 14.9%, kunjungan neonatus lengkap 95.1%.

2. Menurunkan angka kesakitan dengan indikator sasaran persentase penyakit menular dan tidak menular.

a. Persentase Penyakit Menular

Menurunnya angka kesakitan dipengaruhi oleh persentase penyakit menular dan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit tahun 2020 meliputi indeks API malaria 0.1 per 1000 penduduk, persentase kasus suspek TB mendapat pelayanan sesuai standar 13.8%, penemuan kasus lumpuh layuh akut (*Acute flaccid paralysis/ AFP*) *non polio* penduduk usia < 15 th dengan capaian 1.4 per 100.000, penemuan kasus baru pneumonia 66.7%.

b. Persentase Penyakit Tidak Menular

Persentase terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit tidak menular, seperti hipertensi (3.3% dari jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun), diabetes mellitus 100%, Puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu 100%, perempuan usia 30-50 yang dideteksi kanker serviks dan kanker payudara 2.5%, ODGJ yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 48.9%.

3. Meningkatkan Status Gizi

Indikator sasaran tahun 2020 meliputi prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita yaitu 20.6%, persentase balita gizi buruk 2.10%, persentase balita kurus (BB/TB) 8.30%. Semakin baiknya penemuan kasus gizi, sehingga banyak kasus gizi buruk yang terjaring dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan meliputi indeks keluarga sehat, puskesmas yang terakreditasi, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2020 semua puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Pasaman Barat sudah terakreditasi. Kualitas pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh sumber daya kesehatan seperti sumber daya manusia dimana jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat 1.334 orang tenaga (29 dokter spesialis, 72 dokter umum, 28 dokter gigi dan dokter gigi spesialis, 554 bidan, 490 perawat, 45 tenaga kesehatan masyarakat, 15 tenaga sanitarian, 29 tenaga gizi, 72 tenaga kefarmasian).

Sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan cukup memadai dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Fasilitas kesehatan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos KIA, Klinik dan lain-lain. Kabupaten Pasaman Barat memiliki 1 rumah sakit milik pemerintah RSUD dan 2 rumah sakit swasta yaitu RS Ibnu Sina dan RSIA Al Ihsan. Pada tingkat kecamatan, minimal setiap kecamatan memiliki 1 puskesmas. Puskesmas rawat inap sebanyak 13 Puskesmas dan puskesmas non rawat inap 7 Puskesmas, 40 Puskesmas Pembantu, 75 Polindes, 10 Poskesdes, 474 Posyandu.

5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas kesehatan, yang terdiri dari 3 indikator yaitu Nilai SAKIP, Nilai SPIP, dan Opini Laporan Keuangan.

Berikut tabel rekapitulasi pelaksanaan renja sampai tahun 2020.

**Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s.d tahun 2020
Kabupaten Pasaman Barat**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7,00	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100%							
1	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%							
1	02	01	01	01	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	100	84,22	84,22			
1	02	01	01	02	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur yang dipeliharasecara rutin dan berkala	118 unit	100	100	87,27	87,27			
1	02	01	01	03	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti aparatur kesehatan	100%	100	100	74,89	74,89			

1	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100	100	0,00			
1	02	01	02	45	Peningkatan Pemanfaatan sarana dan prasarana	Jumlah sosialisasi/ pelatihan/ bimtek tenaga pengelola aplikasi ASPAK yang dilaksanakan	2 kali	100	100	56,12	56,12		
1	02	01	05	04	Sosialisasi Peningkatan kemampuan Tenaga Fungsional Dalam Pembuatan Angka kredit Poin dan Sinkronisasi data SDMK	Persentase izin tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	1	100	100	59,37	59,37		
1	02	01	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat esensial	100%						
1	02	01	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	90	100	96,38	96,38		
1	02	01	15	08	Operasional pengelolaan obat dan perbekkes	Persentase pemenuhan operasional IFK Kabupaten Pasaman Barat	100%	90	100	89,05	89,05		
1	02	01	15	09	Distribusi obat dan E-Logistik	Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan e-logistik di Puskesmas	100%	90	100	79,96	79,96		
1	02	01	16		Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan IKM minimal baik	80%						
1	02	01	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan (P3K), event-event pada hari besar nasional dan kondisi bencana alam	100%	100	100	6,04	6,04		
1	02	01	16	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi ke tingkat Puskesmas	100%	100	100	60,00	60,00		

1	02	01	16	16	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	Persentase penyedia jasa pelayanan kesehatan	100%	-	100	93,72	93,72			
1	02	01	16	17	Operasional dan pemeliharaan kesehatan UPTDK Puskesmas	Persentase pemenuhan operasional dan pemeliharaan kesehatan UPT Puskesmas	100%	100	100	70,86	70,86			
1	02	01	16	24	Peningkatan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	100%	13	100	49,60	49,60			
1	02	01	16	27	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan IPWL	Jumlah Puskesmas yang mengikuti bimbingan teknis IPWL	2 Puskesmas	50%	100	50,00	50,00			
1	02	01	16	28	Intervensi Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasaman Barat	2%	17,8	100	34,56	34,56			
1	02	01	16	29	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100%	100	100	100,00	100,00			
1	02	01	16	30	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	20 UPT Puskesmas	100	100	70,86	70,86			
1	02	01	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kasus penggunaan obat dan bahan berbahaya yang ditindaklanjuti	90%							
1	02	01	17	02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Persentase Pedagang jajanan, sarana pelayanan kefarmasian, IRTTP, dan pasar yang beroperasi sesuai prosedur dan peraturan berlaku	100	100	100	29,32	29,32			
1	02	01	18	07	Sosialisasi Hatra	Jumlah kelompok atau perorangan pelaku hatra yang dibina	40 kelompok		100	44,33	44,33			
1	02	01	19		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase PHBS	65%	65	65	65,00	100,00			

1	02	01	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Persentase masyarakat yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	65%	65	65	65,00	100,00			
1	02	01	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	Prevalensi Gizi Buruk	0,03	0,04	0,03	2,10	1,43			
						Prevalensi Gizi Kurang	11%	73,45	73,45	20,60	28,05			
						Prevalensi Stunting	20%	73,45	73,45	20,60	28,05			
1	02	01	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Cakupan penderita gizi buruk dan gizi kurang yang mendapat makanan tambahan, vitamin dan perawatan	100%	100	100	100,00	100,00			
1	02	01	20	03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Cakupan kasus kurang energi protein (KEP) yang ditangani	100%		100	43,30	43,30			
1	02	01	20	04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah kader posyandu yang dibina	20 kader	100	100	100,00	100,00			
1	02	01	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase jorong Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	84%							
1	02	01	21	01	Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat	Jumlah TTU dan TPM yang memenuhi syarat lingkungan sehat	300 TTU dan 200 TPM		100	76,76	76,76			
1	02	01	21	02	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Jumlah jorong STBM	218 jorong	100	100	0,00	0,00			
1	02	01	21	05	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan kesehatan lingkungan	11 kecamatan	100	100	75,00	75,00			

1	02	01	22		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Prevalensi penyakit menular	100%		100	83,35	83,35			
						Prevalensi penyakit tidak menular	100%		100	70,01	70,01			
1	02	01	22	04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah jorong UCI	216 jorong		100	43,25	43,25			
1	02	01	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1 kali	100	100	83,35	83,35			
1	02		22	14	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (PTM)	Cakupan ODGI dan penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	24	100	48,90	48,90			
1	02	01	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	1							
1	02	01	23	07	Pemantapan Sistem Informasi Kesehatan	Tersusunnya buku profil kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	1 Buku	100	100	100,00	100,00			
1	02	01	23	08	Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas terakreditasi	20 UPT Puskesmas	20	20	20,00	100,00			
1	02	01	24		Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga	Cakupan penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	100%							
1	02	01	24	01	Kemiteraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan Sumbat Sakato (JKSS)	36.907 jiwa		100	99,31	99,31			
1	02	01	24	04	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Pelaksanaan sosialisasi program JKN di UPT Puskesmas	4 kali		100	71,44	71,44			

1	02	01	24		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin / FKTP Puskesmas/ BLUD	Cakupan pemenuhan Jaminan Kesehatan	1							
1	02	01	24		FKTP Puskesmas/ BLUD	Cakupan terlaksananya Puskesmas BLUD	100%	100	100	100,00	100,00			
1	02	01	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Puskesmas	65%							
1	02	01	25	01	Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas dan pustu yang dibangun dan/direhabilitasi	12 unit		100	100,00	100,00			
1	02	01	25	02	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan	15 Puskesmas		100	100,00	100,00			
1	02	01	32		Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian Ibu	81/100.000 kelahiran hidup	163/100.000 kelahiran hidup	81/100.000 kelahiran hidup	219/100.000 kelahiran hidup	36,98			
						Angka Kematian Bayi	9/1000 KH	8,9/1000 kelahiran hidup	9/1000 kelahiran hidup	12,8/1000 kelahiran hidup	74,50			
						Angka Kematian Balita	9/1000 KH	9,94/1000 kelahiran hidup	9/1000 kelahiran hidup	1,06/1000 kelahiran hidup	100,00			
1	02	01	32	05	Evaluasi Program Kesga, KB dan kesehatan reproduksi	Jumlah tenaga kesehatan yang dibina	200 orang	100	100	68,65	68,65			
1	02	01	32	09	Pelayanan Jaminanan Persalinan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan jaminan persalinan (Jampersal)	900 orang	100	100	71,05	71,05			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan tahun 2020 dapat tergambar dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020. SPM mengatur pembagian urusan pemerintahan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal, baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. SPM kesehatan daerah kabupaten/kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM saat ini mengalami perubahan dibanding konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target merupakan kinerja program kesehatan, sedangkan SPM saat ini pencapaian target-target menjadi penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4/MENKES/PER/I/2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan program-program kesehatan untuk memenuhi standar minimal pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berikut uraian SPM bidang kesehatan tahun 2020 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM :

Tabel 2.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan ibu hamil	K4	95	95	95	95	62.32	58.6	95	95	
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayananan kesehatan ibu bersalin	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	92	93	93	95	73.31	72.9	93	95	
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kunjungan bayi	90	95	95	95	73.0	95.1	95	95	
4	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan balita	Kunjungan Balita	90	95	95	95	61.0	70.0	95	95	
5	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pelayanan kesehatan anak SD dan SMP	100	100	100	100	73.8	27.8	100	100	
6	Persentase usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Posbindu	60	60	60	60	24.86	12.14	60	60	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan kesehatan lansia	80	80	80	100	13.0	49.6	80	100	
8	Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	8.7	3.3	100	100	
9	Persentase penderita DM usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Pelayanan ODGJ	100	100	100	100	24.1	48.9	100	100	
11	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	13.78	100	100	
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang dengan risiko HIV yang dilayani	100	100	100	100	67.17	46.1	100	100	

Berdasarkan tabel di atas, capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerjanya adalah dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) pada tahun 2020 adalah 58.6% berada di bawah target 100% yang telah ditetapkan.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi pelayanan persalinan normal, dan persalinan komplikasi, angka untuk capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2020 adalah 73.31%.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi standar kuantitas, dan standar kualitas. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2020 adalah 95.1%.

4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2020 adalah 70.0%, belum mencapai target pelayanan yang ditetapkan. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Pada tahun 2020 anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebesar 27.8%.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di

wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah 12,14%.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian untuk pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar tahun 2020 adalah 49.6%.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian pada indikator ini adalah 3.3%.

9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan

sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian pada indikator ini adalah 100%.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian pada indikator ini adalah 48.9%, masih di bawah target 100% yang ditetapkan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pelayanan pada ODGJ adalah keterbatasan obat pasien jiwa yang tidak tersedia selama 6 bulan, sehingga pasien jiwa tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar.

11. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TB di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TB dinilai dari persentase jumlah orang terduga TB yang

mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian pada indikator ini adalah 13.78%.

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian pada indikator ini adalah 46.1%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pasaman Barat. Isu-isu yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
			Internal (Kewenangan Dinas Kesehatan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kesehatan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil analisis gambaran pelayanan	1. Angka kematian ibu 219 per 100.000 kelahiran hidup. Target SDG's 2030 70 per 100.000 kelahiran hidup.	SDGs, Renstra 2016-2021	1. SDM kesehatan belum memadai, khususnya untuk kasus patologi kebidanan 2. Fasilitas dan sarana prasarana belum memadai, misalnya peralatan labor untuk pemeriksaan ibu hamil di bidan desa tidak lengkap. Ibu hamil hanya melakukan pemeriksaan labor ke Puskesmas atau apabila ada petugas yang turun ke desa atau jorong. 3. Sistem rujukan belum optimal, keterlambatan dalam merujuk pasien ditambah dengan jarak ke Puskesmas atau RS cukup jauh. 4. <i>Policy/</i> Regulasi masih kurang 5. Koordinasi lintas program belum terpadu.	1. Lulusan institusi pendidikan belum siap pakai 2. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak belum maksimal 3. Dukungan lintas sektor masih kurang 4. Program pemberdayaan masyarakat untuk desa siaga belum optimal	1. Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM yang belum merata, beberapa formasi untuk tenaga kesehatan tertentu belum memadai. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana program yang belum terpenuhi secara lengkap dan terus menerus 3. Mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar, Standar pelayanan ANC masih 7T, padahal seharusnya sudah 10T. 4. Sistem rujukan maternal neonatal belum optimal
	2. Prevalensi <i>Stunting</i> 20.6% Persentase balita gizi buruk 2.10%	SDGs, Renstra 2016-2021	1. SDM gizi belum mencukupi, penyebaran tenaga gizi belum merata 2. Fasilitas dan sarana prasarana antropometri belum lengkap 3. Sistem rujukan gizi belum optimal	1. Ketersediaan dan pengolahan pangan di rumah tangga belum optimal pengaruh dari faktor sosio ekonomi yang masih rendah, faktor lingkungan dan	1. Kompetensi, jumlah dan distribusi SDK (nutrisi) belum merata 2. Ketersediaan sarana dan prasarana program yang belum terpenuhi secara lengkap dan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
			Internal (Kewenangan Dinas Kesehatan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kesehatan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				budaya 2. Pengetahuan dan pendidikan masyarakat masih kurang, pola asuh yang salah 3. Dukungan lintas sektor	terus menerus 3. Adanya penyakit infeksi
	3. Kejadian Penyakit menular masih tinggi (API 0.1 per 1000 penduduk; suspek TB 13.8%; AFP 1.4 per 100.000 penduduk; pneumonia 6.7%) dan meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM)	SDGs, Renstra 2016-2021	1. SDM pemegang program masih belum memadai 2. Anggaran, sarana dan prasarana program masih kurang, Posbindu Kit yang masih sangat terbatas, bahan pemeriksaan <i>triple eliminasi</i> masih kurang 3. Sistem rujukan	1. Perubahan iklim dan cuaca 2. Gaya atau pola hidup masyarakat yang kurang baik 3. Perubahan virulensi dan resistensi agen penyakit 4. Dukungan lintas sektor 5. Lingkungan tidak sehat 6. Kemudahan transportasi 7. Migrasi atau mobilisasi penduduk 8. Tingkat pengetahuan masyarakat	1. Perubahan iklim yang mempengaruhi virulensi agen penyebab penyakit 2. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu 3. Kemudahan transportasi dan migrasi penduduk yang menyebabkan penyebaran penyakit menular 4. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit 5. Masih rendahnya pembiayaan untuk penyakit2 khusus terutama gangguan indera
	4. Masih rendahnya akses sanitasi	Renstra 2016-2021	1. Tenaga yang belum merata 2. Fasilitas dan sarana prasarana belum memadai	1. Kesadaran masyarakat tentang lingkungan belum maksimal, seperti	1. Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM penyehatan lingkungan yang kurang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
			Internal (Kewenangan Dinas Kesehatan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kesehatan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dasar dan masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat		3. Koordinasi lintas program belum terpadu 4. Upaya kesehatan masih bersifat kuratif	penggunaan jamban sehat, pembuangan limbah rumah tangga, merokok, akses air minum berkualitas yang masih terbatas 2. Dukungan lintas sektor masih kurang 3. Koordinasi penanggulangan kualitas lingkungan belum terpadu 4. Pemberdayaan masyarakat yang masih kurang 5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat 6. Belum maksimalnya dukungan dunia usaha	merata 2. Fasilitas dan sarana prasarana belum memadai termasuk pengukuran faktor risiko lingkungan 3. Koordinasi lintas program belum terpadu 4. Belum maksimalnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum memenuhi standar. Pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat belum sesuai standar.
2. Jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan masih kurang; distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Tenaga kesehatan seperti dokter gigi, tenaga gizi tenaga sanitarian, apoteker, asisten apoteker, dan lainnya masih kurang. Kemampuan tenaga kesehatan dalam pelayanan terutama untuk kasus gawat darurat dan komplikasi masih kurang, kemampuan pengelola kegiatan atau program yang masih terbatas sehingga program atau kegiatan belum terlaksana dengan optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana program yang belum terpenuhi secara lengkap dan terus menerus, seperti bahan habis pakai untuk pemeriksaan laboratorium, triple eliminasi, dan posbindu kit.
3. Konsumsi dan asupan zat gizi yang tidak seimbang, diiringi dengan adanya penyakit infeksi yang menyebabkan bayi dan balita kekurangan gizi atau mengalami gizi buruk. Hal ini akan berdampak jangka panjang seperti *stunting*, kwashiorkor, marasmus, marasmik-kwashiorkor, ibu hamil KEK, anemia pada remaja dan ibu hamil, serta gangguan kesehatan lainnya.
4. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
5. Faktor lingkungan yang kurang sehat, serta adanya kemudahan transportasi dan migrasi penduduk yang menyebabkan cepatnya penyebaran penyakit menular.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Banyak kebiasaan masyarakat yang tidak sehat sehingga menyebabkan

peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti merokok, alkohol, kurang aktivitas fisik, pola makan yang kurang sehat seperti kurang konsumsi buah dan sayur, banyak mengkonsumsi makanan cepat saji, narkoba, dll.

7. Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum optimal dan belum maksimal kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pembiayaan belum memenuhi kebutuhan minimal untuk meningkatkan capaian kinerja kesehatan.

Setelah ditemukannya permasalahan dalam pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan, maka perlu diketahui juga permasalahan atau isu-isu strategis secara luas seperti isu internasional, regional, nasional maupun isu lainnya yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong atau menghambat dalam pelayanan. Isu strategis yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1. <i>AFTA (Asean Free Trade Area)</i> 2. <i>SDGS (Suistainable Developments Goals)</i> 3. <i>Universal Coverage</i> 4. <i>Frame Convention on Tobacco Control (FTCT)</i> 5. <i>Global Warming</i> 6. Konvensi ILO 7. <i>AEC (ASEAN Economic Community)</i>	1. Otonomi daerah 2. Regulasi kementrian kesehatan belum semua mendukung daerah 3. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang pesat 4. Kebijakan JKN 5. Indikator MDGs yang	1. Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan 2. Belum adanya pemerataan tenaga kesehatan 3. Perizinan, standarisasi dan akreditasi pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan 4. Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan 5. Belum semua masyarakat	

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)
8. Hak Asasi Manusia (HAM)	berakhir dan belum tercapai, digantikan dengan SDGs 6. Kebijakan cukai dan pajak rokok 7. Perubahan lingkungan menyebabkan bencana alam dan sosial 8. Pengarusutamaan gender	menjadi peserta jaminan kesehatan 6. Kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan belum optimal 7. PHBS yang masih kurang, perubahan gaya hidup, konsumsi makanan dan bahan makanan tambahan dengan pengawasan yang belum optimal 8. Kondisi lingkungan umum, lingkungan kesehatan kurang mendukung.	

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2022, diproyeksikan bahwa APBD Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari

- | | | |
|---------------|----|--------------------|
| 1) Pendapatan | Rp | 60.000.000,00 |
| 2) Belanja | Rp | 129.340.606.505,00 |

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5 (T-C.31) Review terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						65.482.113.193	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						65.482.113.193
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						71.835.645	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						71.835.645
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100%	5 dokumen	46.942.350	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100%	5 dokumen	46.942.350
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	2 dokumen	24.893.295	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	2 dokumen	24.893.295
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						63.667.024.816	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						63.667.024.816
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah PNS dan P3K yang memperoleh gaji dan tunjangan	100%	741 orang PNS	57.416.427.316	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah PNS dan P3K yang memperoleh gaji dan tunjangan	100%	741 orang PNS	57.416.427.316
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah THL yang melaksanakan administrasi tugas ASN	100%	293	5.838.787.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah THL yang melaksanakan administrasi tugas ASN	100%	293	5.838.787.500

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Penyediaan honorarium pejabat/ petugas pengelola keuangan	100%	12 bulan	411.810.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Penyediaan honorarium pejabat/ petugas pengelola keuangan	100%	12 bulan	411.810.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						485.178.750	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						485.178.750
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Penyediaan honorarium pengurus penyimpanan barang daerah dan penyediaan honorarium pembantu pengurus barang	100%	12 bulan	164.713.500	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Penyediaan honorarium pengurus penyimpanan barang daerah dan penyediaan honorarium pembantu pengurus barang	100%	12 bulan	164.713.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah barang daerah yang dipelihara oleh dinas kesehatan	100%	30 Unit	320.465.250	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah barang daerah yang dipelihara oleh dinas kesehatan	100%	30 Unit	320.465.250
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	6 orang PNS	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	6 orang PNS	20.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	72 orang PNS	27.360.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	72 orang PNS	27.360.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	72 orang PNS	27.360.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	72 orang PNS	27.360.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah						795.438.203	Administrasi Umum Perangkat Daerah						795.438.203
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1 paket	275.316.503	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1 paket	275.316.503
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	1 paket	54.516.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	1 paket	54.516.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pemerintah pusat dan provinsi yang diikuti	100%	100 kali	465.605.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pemerintah pusat dan provinsi yang diikuti	100%	100 kali	465.605.700
			Jumlah penyediaan makan/minum rapat	100%	12 kali					Jumlah penyediaan makan/minum rapat	100%	12 kali	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						387.915.779	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						387.915.779
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Frekuensi penyediaan kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air untuk operasional kantor	100%	12 bulan	367.915.779	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Frekuensi penyediaan kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air untuk operasional kantor	100%	12 bulan	367.915.779
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	12 bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	12 bulan	2.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						59.025.334.672	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						59.025.334.672

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						22.147.195.113	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						22.147.195.113
Pembangunan Puskesmas	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang dilakukan pembangunan	100%	2 paket	8.000.000.000	Pembangunan Puskesmas	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang dilakukan pembangunan	100%	2 paket	8.000.000.000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	100%	1 paket	787.500.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	100%	1 paket	787.500.000
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang akan dibangun	100%	1 paket	319.725.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang akan dibangun	100%	1 paket	319.725.000
Pengembangan Puskesmas	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah sarana puskesmas yang dilakukan pengembangan	100%	5 paket	2.300.000.000	Pengembangan Puskesmas	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah sarana puskesmas yang dilakukan pengembangan	100%	5 paket	2.300.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pustu yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan dalam 1 tahun	100%	2 Paket	800.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pustu yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan dalam 1 tahun	100%	2 Paket	800.000.000
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah fasyankes yang mendapatkan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	100%	23 paket	73.300.500	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah fasyankes yang mendapatkan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	100%	23 paket	73.300.500
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan	100%	20 paket	4.929.299.365	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan	100%	20 paket	4.929.299.365

			kesehatan							kesehatan			
Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tersedianya obat & vaksin serta pengelolaan obat dan vaksin	100%	20 puskesmas	1.456.299.363	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tersedianya obat & vaksin serta pengelolaan obat dan vaksin	100%	20 puskesmas	1.456.299.363
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan bahan habis pakai	100%	20 puskesmas	3.181.053.860	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan bahan habis pakai	100%	20 puskesmas	3.181.053.860
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	100%	3 paket	195.968.850	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	100%	3 paket	195.968.850
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala serta kalibrasi	100%	1 paket	104.048.175	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala serta kalibrasi	100%	1 paket	104.048.175
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						36.524.116.926	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						36.524.116.926
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	144.795.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	144.795.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	2.698.909.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	2.698.909.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	108.289.125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	108.289.125
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	71.306.812	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	71.306.812
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	26.250.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	26.250.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	21.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	21.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	21.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	21.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	21.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	21.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penderita diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	26.250.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penderita diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	26.250.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	204.801.030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	204.801.030
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase orang terduga TB yang mendapat pemeriksaan TB	100%	100%	26.250.315	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase orang terduga TB yang mendapat pemeriksaan TB	100%	100%	26.250.315
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	213.994.909	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	213.994.909
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada penduduk pada kondisi KLB	100%	100%	20.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada penduduk pada kondisi KLB	100%		20.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	100%	100%	603.095.063	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	100%	100%	603.095.063
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	20 puskesmas	20 puskesmas	100.250.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	20 puskesmas	20 puskesmas	100.250.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	19 desa/ nagari	19 desa/ nagari	204.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	19 desa/ nagari	19 desa/ nagari	204.750.000
			Jumlah fasyankes yang memiliki pengolahan limbah medis	23 fasyankes	23 fasyankes					Jumlah fasyankes yang memiliki pengolahan limbah medis	23 fasyankes	23 fasyankes	
			Jumlah sarana air minum diawasi	200 sarana air minum	200 sarana air minum					Jumlah sarana air minum diawasi	200 sarana air minum	200 sarana air minum	
			Jumlah fasilitas umum diawasi	100 TTU	100 TTU					Jumlah fasilitas umum diawasi	100 TTU	100 TTU	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan yang berkualitas	20 puskesmas	20 puskesmas	615.888.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan yang berkualitas	20 puskesmas	20 puskesmas	615.888.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembinaan terhadap kelompok atau perorangan pelaku penyehatan tradisional	40 kegiatan	40 kegiatan	78.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembinaan terhadap kelompok atau perorangan pelaku penyehatan tradisional	40 kegiatan	40 kegiatan	78.750.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan	3 kegiatan	3 kegiatan	399.000.105	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan	3 kegiatan	3 kegiatan	399.000.105
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan IPWL	20 puskesmas	20 puskesmas	20.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan IPWL	20 puskesmas	20 puskesmas	20.000.000

		masyarakat							masyarakat				
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pengelolaan upaya kesehatan khusus (PMI)	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	525.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pengelolaan upaya kesehatan khusus (PMI)	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	525.000.000
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Upaya Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 kegiatan	2 kegiatan	20.000.000	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Upaya Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 kegiatan	2 kegiatan	20.000.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehata penyakit menular dan tidak menular	20 puskesmas	20 puskesmas	26.171.250	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehata penyakit menular dan tidak menular	20 puskesmas	20 puskesmas	26.171.250
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	36907 jiwa	36907 jiwa	14.728.245.840	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	36907 jiwa	36907 jiwa	14.728.245.840
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	21.000.000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	21.000.000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional	12 kegiatan	12 kegiatan	20.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional	12 kegiatan	12 kegiatan	20.000.000
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembinaan kawasan sehat	11 kecamatan	11 kecamatan	26.250.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembinaan kawasan sehat	11 kecamatan	11 kecamatan	26.250.000

Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah penyediaan telemedicine di fasyankes	1 paket	1 paket	50.000.000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah penyediaan telemedicine di fasyankes	1 paket	1 paket	50.000.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pemenuhan operasional pelayanan puskesmas	20 puskesmas	20 puskesmas	11.484.383.427	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pemenuhan operasional pelayanan puskesmas	20 puskesmas	20 puskesmas	11.484.383.427
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan akreditasi dan reakreditasi puskesmas	20 puskesmas	20 puskesmas	1.383.712.050	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan akreditasi dan reakreditasi puskesmas	20 puskesmas	20 puskesmas	1.383.712.050
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah penanganan KIPi dan pemberian obat massal yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	26.250.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah penanganan KIPi dan pemberian obat massal yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	26.250.000
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kewaspadaan dini dan respon wabah yang dilaksanakan	100%	100%	20.000.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kewaspadaan dini dan respon wabah yang dilaksanakan	100%	100%	20.000.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah penyediaan pengelolaan SPGDT	1 paket	1 paket	2.037.525.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah penyediaan pengelolaan SPGDT	1 paket	1 paket	2.037.525.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						171.254.028	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						171.254.028
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Persentase pengelolaan data dan informasi kesehatan	100%	100%	91.444.290	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Persentase pengelolaan data dan informasi kesehatan	100%	100%	91.444.290

Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	2 kegiatan	2 kegiatan	20.000.000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	2 kegiatan	2 kegiatan	20.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	4 kegiatan	4 kegiatan	26.250.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	4 kegiatan	4 kegiatan	26.250.000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						3.055.340.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						3.055.340.000
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase kegiatan perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	100%	100%	21.000.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase kegiatan perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	100%	100%	21.000.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	100%	100%	3.014.340.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	100%	100%	3.014.340.000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	4 kegiatan	4 kegiatan	20.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	4 kegiatan	4 kegiatan	20.000.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						535.165.050	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						535.165.050
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	535.165.050	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	535.165.050
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						

						294.305.540							294.305.540
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						37.221.440	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						37.221.440
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Pasaman Barat	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17 kegiatan	17 kegiatan	37.221.440	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Pasaman Barat	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17 kegiatan	17 kegiatan	37.221.440
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						37.800.000	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						37.800.000
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	37.800.000	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	37.800.000
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						102.632.250	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						102.632.250
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Kab. Pasaman Barat	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pemilik industri rumah tangga pangan	1 kegiatan	1 kegiatan	102.632.250	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Kab. Pasaman Barat	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pemilik industri rumah tangga pangan	1 kegiatan	1 kegiatan	102.632.250

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	11 kecamatan	11 kecamatan	747.810.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	11 kecamatan	11 kecamatan	747.810.000
Total						129.340.606.505	Total						129.340.606.505
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						122.388.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						122.388.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						122.388.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						122.388.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan IFK	100%	100%	122.388.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan IFK	100%	100%	122.388.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						196.356.300	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						196.356.300
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						196.356.300	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						196.356.300
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan operasional instalasi farmasi kabupaten (IFK)	100%	100%	196.356.300	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan operasional instalasi farmasi kabupaten (IFK)	100%	100%	196.356.300
Total						318.744.300	Total						318.744.300
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						529.742.459	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						529.742.459
Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan rumah sakit (RS Ujung Gading) yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	529.742.459	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan rumah sakit (RS Ujung Gading) yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	529.742.459

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						210.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						210.000.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan operasional rumah sakit yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	210.000.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan operasional rumah sakit yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	210.000.000
Total						739.742.459	Total						739.742.459
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan operasional fasilitas kesehatan lainnya yang dilaksanakan (Labkesda)	1 kegiatan	1 kegiatan	132.263.460	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan operasional fasilitas kesehatan lainnya yang dilaksanakan (Labkesda)	1 kegiatan	1 kegiatan	132.263.460
Total						132.263.460	Total						132.263.460

2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam koordinasi dan sinergi program-program pembangunan di bidang kesehatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat memiliki usulan program dari masyarakat dan dari kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Daftar Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD TA. 2022 yang ditawarkan pada Pelaksanaan Forum OPD TA. 2021

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Vol	Pagu (Rp)
1.	Pembangunan Puskesmas				
	Gedung Puskesmas Muara Kiawai	Jr Kartini	Gunung Tuleh	1 unit	4.000.000.000
	Gedung Rawat Inap Puskesmas Ranah Salido	Ranah Salido	Lembah Melintang	1 unit	4.000.000.000
2.	Pengembangan Puskesmas				
	Penambahan Ruang Puskesmas Aia Gadang	Aia Gadang	Pasaman	1 unit	500.000.000
	Pembangunan Aula Puskesmas Ujung Gading	Tampus	Lembah Melintang	1 unit	500.000.000
	Gudang Obat Puskesmas Air Bangis	Air Bangis	Sungai Beremas	1 unit	300.000.000
	Pembangunan Aula Puskesmas Air Bangis	Air Bangis	Sungai Beremas	1 unit	500.000.000
	Pembangunan Aula Puskesmas Desa Baru	Desa Baru	Ranah Batahan	1 unit	500.000.000
3.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
	Rehab Pustu Rabi Jonggor	Paraman Ampalu	Gunung Tuleh	1 unit	400.000.000
	Rehab Pustu Lubuk Gadang	Parit	Koto Balingka	1 unit	400.000.000

Usulan yang diakomodir adalah sebanyak 11 usulan, 9 usulan diterima. Usulan ini berasal dari 6 Kecamatan yang disampaikan pada saat pelaksanaan Forum OPD tahun 2021.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh

4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Batasan pengembangan (*Development constraint*) sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi keterbatasan SDA yang dapat diberdayagunakan sebagai modal utama pembangunan yang perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas diketahui beberapa parameter sumber daya alam yang perlu dipertimbangkan aspek keterbatasannya dalam perencanaan pembangunan meliputi hutan primer, hutan di atas lahan gambut, habitat spesies langka, area pesisir terdampak perubahan iklim, kawasan rawan bencana, ketersediaan air, ketersediaan energi, tingkat emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca.

Kaidah Pembangunan Nasional 2020-2024

1. Membangun Kemandirian → Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia, dengan cara:
 - a. Memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumberdaya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan.
 - b. Mampu mendorong tumbuhnya iptek berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa.
 - c. Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
 - d. Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki skill dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
 - e. Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri.
2. Menjamin Keadilan → Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
 - a. Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan.
 - b. Bersikap inklusif atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan.

- c. Kesenjangan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehingga setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.
 - d. Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara.
 - e. Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab.
 - f. Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas.
3. Menjaga Keberlanjutan → Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.
- a. Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi
 - b. Terpatrynya orientasi sikap (*Attitude*) yang bertanggung jawab sebagai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju
 - c. Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan inclusive dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan

- d. Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan
- e. Bersifat inklusif dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara integratif
- f. Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhkan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara input, proses dan output pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dinas Kesehatan

Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat Poin Misi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas kesehatan	Opini laporan keuangan Nilai SAKIP Level maturitas SPIP Nilai WBK-WBBM Indeks Kepuasan Masyarakat
Mewujudkan Pasaman Barat Maju dan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat :	1. Menurunkan angka kematian pada kelompok rentan	Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB)

Sejahtera Poin Misi: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Usia Harapan Hidup	2. Menurunkan angka kesakitan	Persentase Penyakit Menular yang ditemukan dan diobati
			Persentase Penyakit Tidak Menular yang ditemukan dan diobati
		3. Meningkatkan status gizi	Persentase gizi buruk pada balita
	Prevalensi Stunting	Menurunkan prevalensi stunting	Persentase gizi kurang pada balita (balita kurus (BB/TB)) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita (persen)

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pembangunan kesehatan dan pengawasan bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan kesehatan di seluruh bidang yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam kegiatan berikut:

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			2	Evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
			4	Penyediaan administrasi

			pelaksanaan tugas ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
			6 Pengamanan barang milik daerah SKPD
			7 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
			8 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (IFK)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
			10 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
			11 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			13 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			14 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			16 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17 Pembangunan Puskesmas
			18 Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
			19 Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan
			20 Pengembangan Puskesmas
			21 Pengembangan Rumah Sakit (RS Ujung Gading)
			22 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
			23 Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
			24 Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
			25 Pengadaan obat, vaksin
			26 Pengadaan bahan habis pakai
			27 Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
			28 Pemeliharaan rutin dan berkala

			alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
		29	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
		30	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
		31	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
		32	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
		33	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
		34	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
		35	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
		36	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
		37	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
		38	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
		39	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
		40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
		41	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		42	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
		43	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
		44	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
		45	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
		46	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan

	47	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
	48	Pengelolaan surveilans kesehatan
	49	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)
	50	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
	51	Pengelolaan upaya kesehatan khusus
	52	Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan
	53	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
	54	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	55	Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah
	56	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional
	57	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
	58	Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan
	59	Operasional pelayanan puskesmas
	60	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (IFK)
	61	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (Labkesda)
	62	Operasional pelayanan rumah sakit (RS Ujung Gading)
	63	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
	64	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
	65	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
	66	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat

				Darurat Terpadu (SPGDT)
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	67	Pengelolaan data dan informasi kesehatan
			68	Pengelolaan sistem informasi kesehatan
			69	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
			71	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
			72	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	73	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
			74	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	75	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan
			76	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
			77	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan	80	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan

		Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	81	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	82	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	83	Pemeriksaan Post Market pada produk makanan- minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Berikut ditampilkan tabel rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk tahun anggaran 2022 :

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								129,340,606,505				135,758,347,461		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								65,482,113,193				68,706,929,482		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								71,835,645				26,138,009		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			100 %	5 dokumen		46,942,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	49,289,467	
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			100 %	2 dokumen		24,893,295			Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	26,137,960	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								63,667,024,816				66,850,376,104		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah PNS dan P3K yang memperoleh gaji dan tunjangan			100 %	741 orang PNS		57,416,427,316	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	60,287,248,729	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah THL yang melaksanakan administrasi tugas ASN			100 %			5,838,787,500			Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	6,130,726,875	
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Penyediaan honorarium pejabat/ petugas pengelola keuangan			100 %	12 bulan		411,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	432,400,500	
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								485,178,750				509,437,688		
1	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Penyediaan honorarium pengurus penyimpanan barang daerah dan penyediaan honorarium pembantu pengurus barang			100 %	12 bulan		164,713,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	172,949,175	
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah barang daerah yang dipelihara oleh dinas kesehatan			100 %	30 Unit		320,465,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	336,488,513	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								74,720,000				78,456,000		
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			100 %	6 orang PNS		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	21,000,000	
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			100 %	72 orang PNS		27,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	28,728,000	

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah ASN yang mengikuti binbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			100 %	72 orang PNS		27,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	28,728,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								795,438,203	835,210,113				
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			100 %	1 paket		275,316,503			Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	289,082,328
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			100 %	1 paket		54,516,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	57,241,800
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pemerintah pusat dan provinsi yang diikuti			100 %	100 kali		465,605,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	488,885,985
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								387,915,779	407,311,568				
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Frekuensi penyediaan kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air untuk operasional kantor			100 %	12 bulan		367,915,779	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	386,311,568
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor			100 %	12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	21,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								59,025,334,672	61,976,601,407				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								22,147,195,113	23,254,554,869				
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang dilakukan pembangunan		Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Ujung Gading Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Muaro Kiawai	100 %	2 paket		8,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	8,400,000,000
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembangunan fasilitas kesehatan lainnya			100 %	1 paket		787,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	826,875,000
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				100 %	1 paket		319,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	335,711,250

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah sarana puskesmas yang dilakukan pengembangan		Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih Kab. Pasaman Barat, Lembah Melintang, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aia Gadang Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	100 %	5 paket		2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	2,415,000,000
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pustu yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan dalam 1 tahun		Kab. Pasaman Barat, Gunungtuleh, Rabi Jonggor Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kelurahan	100 %	2 paket		800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	840,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah fasyankes yang mendapatkan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan			100 %	23 paket		73,300,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	76,965,525
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan			100 %	20 paket		4,929,299,365	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	5,175,764,333
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tersedianya obat & vaksin serta pengelolaan obat dan vaksin			100 %	20 puskesmas		1,456,299,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,529,114,331

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan bahan habis pakai			100 %	20 puskesmas		3,181,053,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	3,340,106,553
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara			100 %	3 paket		195,968,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	205,767,293
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala serta kalibrasi			100 %	1 paket		104,048,175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	109,250,584
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								36,524,116,926	38,350,322,774				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen		144,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	152,034,750
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				100 persen		2,698,909,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	2,833,854,450
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen		108,289,125	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	113,703,581

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	71,306,812	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	74,872,153	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	26,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	27,562,500	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	22,050,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	22,050,000	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	22,050,000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penderita diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	26,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	27,562,500	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	204,801,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	215,041,082	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase orang terduga TB yang mendapat pemeriksaan TB				100 %	26,250,315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	27,562,831	

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	213,994,909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	224,694,654	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada penduduk pada kondisi KLB				100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	21,000,000	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	52,500,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat				100 %	603,095,063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	633,249,816	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga				20 puskesmas	110,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	115,762,500	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan STBM Jumlah fasyankes yang memiliki pengolahan limbah medis Jumlah sarana air minum diawasi Jumlah fasilitas umum diawasi				19 desa/ nagari 23 fasyankes 200 sarana air minum 100 TTU	204,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	214,987,500	

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan yang berkualitas				20 puskesmas		615,888,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	646,682,400
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembinaan terhadap kelompok atau perorangan pelaku penyehatan tradisional				40 kegiatan		78,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	82,687,500
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan				3 kegiatan		399,000,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	418,950,110
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Kegiatan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	21,000,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan IPWL				20 Puskesmas		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	21,000,000
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pengelolaan upaya kesehatan khusus (PMI)				1 paket kegiatan		525,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	551,250,000
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Upaya Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				2 Kegiatan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	21,000,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehata penyakit menular dan tidak menular				20 puskesmas		26,171,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	27,479,813

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan				36907 jiwa		14,728,245,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	15,464,658,132
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah				2 paket kegiatan		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	22,050,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional				12 Kegiatan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	21,000,000
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pembinaan kawasan sehat				11 kecamatan		26,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	27,562,500
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah penyediaan telemedicine di fasyankes				1 paket		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	525,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pemenuhan operasional pelayanan puskesmas				20 puskesmas		11,484,383,427	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	12,058,602,599
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan akreditasi dan reakreditasi puskesmas				20 puskesmas		1,383,712,050	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,452,897,653
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah penanganan KIPI dan pemberian obat massal yang dilaksanakan				2 kegiatan		26,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	27,562,500
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kewaspadaan dini dan respon wabah yang dilaksanakan				100 persen		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	21,000,000
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah penyediaan pengelolaan SPGDT				1 paket		2,037,525,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	2,139,401,250
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							171,254,028				179,816,729		

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan data dan informasi kesehatan					100 %		91,444,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	96,016,505
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pengelolaan sistem informasi kesehatan					100 %		54,809,738	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	57,550,224
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet					1 paket		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	26,250,000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								182,768,605				191,907,035		
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					4 kegiatan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	26,250,000
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan penata kelolaan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten					2 kegiatan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	26,250,000
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan					100 %		132,768,605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	139,407,035
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								3,636,755,050				3,818,592,802		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								46,250,000				48,562,500		
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan					2 kegiatan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %	21,000,000
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan					4 kegiatan		26,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %	27,562,500
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								3,055,340,000				3,208,107,000		
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase kegiatan perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan					100 %		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %	22,050,000

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar				100 %	3,014,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %	3,165,057,000	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan				4 kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %	21,000,000	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							535,165,050			561,923,302			
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten				1 kegiatan	535,165,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %	561,923,302	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							294,305,540			309,020,817			
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							37,221,440			39,082,511			
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				17 kegiatan	37,221,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100 %	39,082,511	
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga							37,800,000			39,690,000			
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 paket	37,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100 %	39,690,000	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							102,632,250			107,763,863			

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pemilik industri rumah tangga pangan				1 kegiatan		102,632,250	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100 %	107,763,863
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							31,500,000				33,075,000		
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap TPM dan DAM				100 %		31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100 %	33,075,000
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							85,151,850				89,409,443		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Jumlah produk makanan industri yang diawasi melalui pengawasan obat dan makanan				12 kegiatan		85,151,850	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100 %	89,409,443
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							902,098,050				947,202,953		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							154,288,050				162,002,453		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah posyandu aktif yang dibina kemitraan dan pemberdayaan masyarakat				40 posyandu		154,288,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	162,002,453
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							747,810,000				785,200,500		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat				11 kecamatan		747,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	785,200,500
TOTAL													129,340,606,505				135,758,347,461	

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD IFK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								122,388,000			128,507,400		
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								122,388,000			128,507,400		
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan IFK				100 persen		122,388,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan penunjang operasional perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	128,507,400
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								196,356,300			206,174,115		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								196,356,300			206,174,115		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan operasional instalasi farmasi kabupaten (IFK)				100 persen		196,356,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	206,174,115
TOTAL													318,744,300				334,681,515	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 RSUD Ujung Gading

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							529,742,459				556,229,582		
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan rumah sakit yang dilaksanakan				1 kegiatan		529,742,459	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	556,229,582
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							210,000,000				220,500,000		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan operasional rumah sakit yang dilaksanakan				1 kegiatan		210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	220,500,000
TOTAL													739,742,459				776,729,582	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Labkesda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan operasional fasilitas kesehatan lainnya yang dilaksanakan				1 kegiatan		132,263,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	138,876,633
TOTAL													132,263,460				138,876,633	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2022 terdiri dari 5 program, 19 kegiatan dan 85 sub kegiatan. Secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut detail program, kegiatan dan sub kegiatan yang diajukan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2022:

Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			2	Evaluasi kinerja perangkat daerah
			3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
			4	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
			5	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6	Pengamanan barang milik daerah SKPD
			7	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
			8	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (IFK)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
			10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
			11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			16	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17	Pembangunan Puskesmas
			18	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
			19	Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan
			20	Pengembangan Puskesmas
			21	Pengembangan Rumah Sakit (RS Ujung Gading)
			22	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
			23	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
			24	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
			25	Pengadaan obat, vaksin
			26	Pengadaan bahan habis pakai
			27	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
			28	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
			30	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
			31	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
			32	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
			33	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
			34	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
			35	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
			36	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
			37	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

38	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
39	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
45	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
46	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
47	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
48	Pengelolaan surveilans kesehatan
49	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)
50	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
51	Pengelolaan upaya kesehatan khusus
52	Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan
53	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
54	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
55	Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah

			56	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional
			57	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
			58	Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan
			59	Operasional pelayanan puskesmas
			60	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (IFK)
			61	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (Labkesda)
			62	Operasional pelayanan rumah sakit (RS Ujung Gading)
			63	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
			64	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
			65	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
			66	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	67	Pengelolaan data dan informasi kesehatan
			68	Pengelolaan sistem informasi kesehatan
			69	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
			71	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
			72	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	73	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
			74	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga

	KESEHATAN			kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	75	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan
			76	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
			77	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	80	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	81	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	82	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)
		Pemeriksaan dan Tindak	83	Pemeriksaan Post Market pada produk makanan- minuman

		Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Pembiayaan dinas kesehatan bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat dan APBN melalui berupa Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non fisik).

BAB V

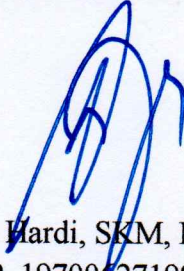
PENUTUP

Rencana kerja OPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil pada pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada tingkatan di atasnya seperti Renstra OPD. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

Program dan kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja harus sesuai dengan target pemerintah dan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai tujuan dan mengatasi permasalahan yang ada sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 berisi informasi capaian dan realisasi program/kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2020. Berdasarkan laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, mayoritas indikator belum mencapai target yang direncanakan. Berbagai faktor mempengaruhi tidak tercapainya target program yang ditetapkan telah menjadi catatan dan evaluasi untuk menyusun rencana kerja tahun 2022. Perencanaan yang baik diharapkan akan memberikan hasil yang baik. Dengan adanya perencanaan program dan kegiatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan memberikan dampaknya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Simpang Empat, 6 Agustus 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman Barat



Jon Hardi, SKM, M.Kes
NIP. 197006271990011001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KESEHATAN



Jl. M. Natsir No. 02 Simpang Empat Telp. / Faks. (0753) 7464101

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR: 440/ 050 /DINKES/2021

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memberikan gambaran dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tentang Pengesahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan .. :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada poin kesatu menjadi pedoman dalam pelaksanaan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 06 Agustus 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN,



JON HARDI, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda IV/ c

Nip. 19700627 199001 1 001